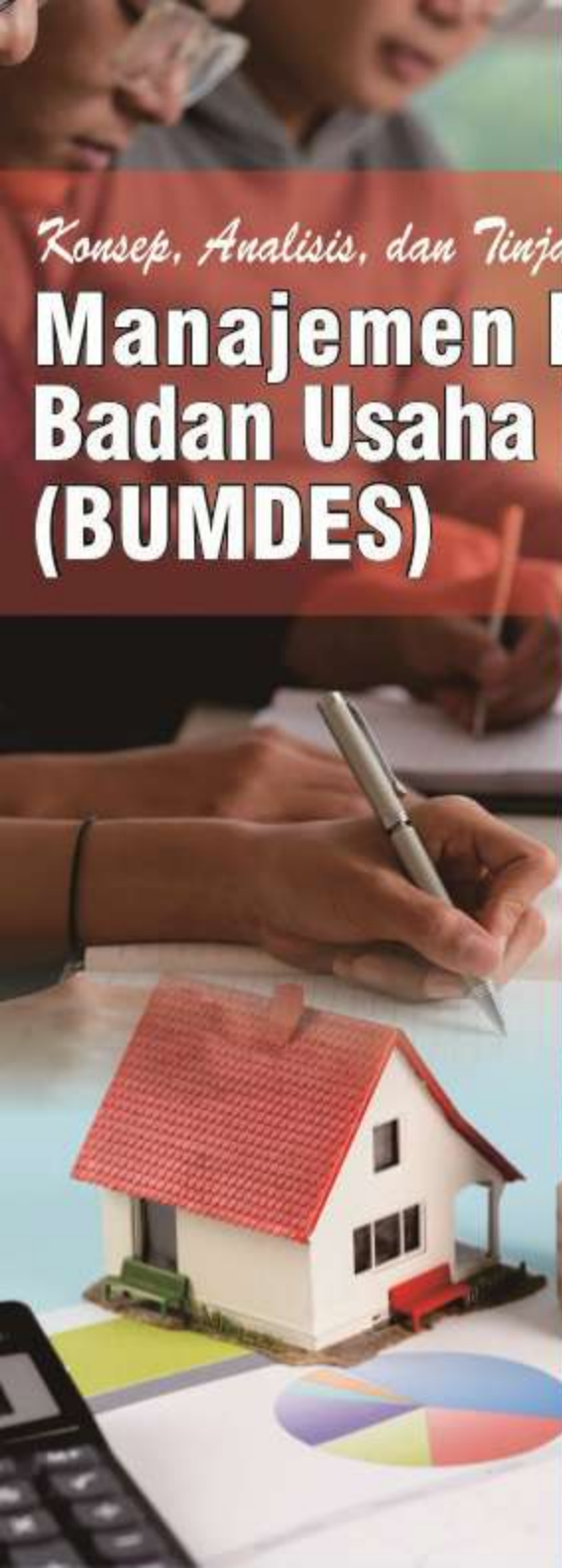


Dr. H. Sihabudin, S.E., M.M.

Konsep, Analisis, dan Tinjauan

Manajemen Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)



Konsep, Analisis, dan Tinjauan

Manajemen Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Dr. H. Sihabudin, S.E., M.M.

***BUMDes Sebagai Penggerak Ekonomi Desa, Ekonomi Bangsa.
Mari wujudkan Sustainable Economic Growth!***



**Konsep, Analisis, dan Tinjauan
MANAJEMEN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)**

Tim Penulis:
Sihabudin

Desain Cover:
Ridwan

Tata Letak:
Handarini Rohana

Editor:
Candra Zonyfar

ISBN:
978-623-459-100-2

Cetakan Pertama:
Juni, 2021

Hak Cipta 2022, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2022

by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG

(Grup CV. Widina Media Utama)

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: @penerbitwidina

*Teruntuk istri dan anak-anaku,
sumber semangat dan inspirasi bagiku*

KATA PENGANTAR

Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki begitu banyak keragaman. Indonesia memiliki keragaman yang begitu banyak, mau itu pada budaya, sumber daya, geografi, suku, ras, dan masih banyak lainnya. Keragaman ini membuat Indonesia itu unik dari pada negara lain. Tentu dengan keragaman dengan keragaman itu datang tantangan tersendiri bagi negara Kesatuan Republik Indonesia. Banyak perbedaan yang datang dengan keragaman itu yang membuat sulitnya pemakaian sumber daya yang dimiliki dengan efektif. Untuk dapat memberdayakan sumber daya yang efektif diperlukannya pemerintahan daerah yang dapat dengan baik memanfaatkan sumber daya yang ada dengan pengelolaan yang baik.

Pengelolaan akan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat agar dapat terjadi perkembangan daerah dengan baik. BUMDes membawa sebuah tujuan yang besar bagi masyarakat, dengan adanya BUMDes diharapkan pemerintah desa dapat melakukan berbagai usaha dan pemberdayaan sumber daya manusia dengan baik. Dengan adanya BUMDes diharapkan masyarakat mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencari dan bahkan membuat mata pencaharian baru sehingga ekonomi masyarakat dan tujuan negara, yaitu kesejahteraan umum bagi rakyat Indonesia, dapat tercapai. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkannya sebuah pengelolaan keuangan yang baik, terutama pengelolaan Akuntansi.

Pada masa kini pengelolaan yang baik dibutuhkan sebuah perhitungan akan dana dan lalu lintas keuangan dengan baik. Pengelolaan akuntansi dari BUMDes merupakan suatu hal yang sangat signifikan akan perkembangan BUMDes. Akuntansi dari BUMDes juga menjadi indikasi kepercayaan bagi masyarakat terhadap pemerintah desa, karena masyarakat akan melihat dari sana, dana yang didapatkan akan dipakai

dan disalurkan ke mana saja. Maka dari pada itu pengelolaan Akuntansi yang baik sangat diperlukan.

Semoga kehadiran buku ini memberikan manfaat bagi semua kalangan baik akademik maupun non akademik, sebagai upaya mendukung terwujudnya ekonomi berkelanjutan dan menyambut Indonesia Emas 2045. Penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kata sempurna, sehingga masukan positif yang membangun sangat diharapkan sebagai peningkatan kualitas dimasa yang akan datang.

Karawang, 10 Mei 2022

Dr. H. Sihabudin, S.E., M.M.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 BUMDes: MANAJEMEN KEUANGAN	1
A. Pendahuluan	2
B. Implementasi Pada BUMDes	7
BAB 2 KINERJA KEUANGAN BUMDes	15
A. BUMDes Sebagai Pembangunan Kesejahteraan	16
B. Pengaruh Pengelolaan Keuangan dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Transparansi Kinerja Keuangan BUMDes	21
C. Kesimpulan	26
BAB 3 BUMDes: SISTEM INFORMASI AKUNTANSI	29
A. Tingkat Pendidikan X Pengalaman Kerja	30
B. Sistem Informasi Akuntansi (SIA)	37
C. Tingkat Pendidikan	38
D. Pengalaman Kerja	40
E. Pelatihan	41
BAB 4 BUMDes: EKSPEKTASI KINERJA, EKSPEKTASI USAHA, DAN MOTIVASI KERJA	43
A. Pendahuluan	44
B. Pengaruh Ekspektasi Kinerja, Ekspektasi Usaha, dan Motivasi Kerja Terhadap Manajemen Akuntansi Pada BUMDes	49
1. Ekspektasi Kinerja	49
2. Ekspektasi Usaha	51
3. Motivasi Kerja	53
C. Penutup	54
BAB 5 BUMDes: PEMASARAN	57
A. Pendahuluan	58
B. Teknologi Informasi dan Media Sosial	65
C. Penutup	70
DAFTAR PUSTAKA	72
PROFIL PENULIS	87



BAB
1

BUMDes: MANAJEMEN KEUANGAN

Desa merupakan daerah yang menjadi cermin akan baik atau buruknya pemerintahan sebuah negara. Desa merupakan wajah pemerintah sebuah negara yang berarti baik dan tertatanya sebuah desa, menandakan baik dan tertatanya sebuah negara.

Sebuah negara tidak dikatakan negara yang maju jika masih banyak memiliki desa-desa tertinggal dan lambat dalam pembangunan menuju dunia modern. Desa sendiri merupakan sebuah wilayah yang spesifik dan memiliki taat hukum yang memiliki sistem pemerintahan sendiri dan diketuai oleh seorang kepala desa. Pemerintah menghadirkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai sebuah langkah pembangunan desa agar menjadikan desa tersebut lebih maju dan terdepan, serta dapat mengikuti perkembangan teknologi dan industri modern di dunia. Hadirnya lembaga BUMDes tentu dibutuhkan pengelolaan yang optimal agar dapat benar-benar menjadi sebuah sarana pemajuan desa-desa tertinggal. Pengelolaan tersebut dapat dilihat dari bagaimana BUMDes itu dikelola dan lebih spesifik lagi, bagaimana pengelolaan keuangan pada lembaga BUMDes. Artikel ilmiah ini bertujuan untuk menganalisis



BAB
2

KINERJA KEUANGAN BUMDes

Sistem Informasi Akuntansi merupakan sebuah sistem yang berguna untuk memroses segala kegiatan atau proses transaksi atau data yang diperlukan pada sebuah lembaga. Hadirnya Sistem Informasi Akuntansi sebagai sebuah sarana untuk meningkatkan kinerja keuangan sebuah lembaga. Selain itu, pengelolaan keuangan yang berupa laporan kegiatan ekonomi yang terjadi di sebuah lembaga juga dinilai mampu menjadi opsi untuk meningkatkan kinerja keuangan sebuah lembaga, dalam hal ini, BUMDes. Yang demikian itu agar terciptanya asas-asas dalam kegiatan transaksi yang salah satu yang dibahas pada buku ini adalah asas transparansi. Transparansi merupakan sikap penjaminan agar pelaku ekonomi mendapatkan informasi yang berkaitan dengan transaksi dengan sejelas-jelasnya tanpa ada yang ditutupi. Bahasan pada bab ini juga bertujuan untuk mengetahui pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan juga pengelolaan keuangan terhadap transparansi kinerja keuangan BUMDes yang ada di Indonesia. Hal tersebut meliputi bahwasanya adanya pengaruh yang positif dan cukup signifikan dari Sistem Informasi Akuntansi dan pengelolaan keuangan terhadap transparansi kinerja

BAB
3

BUMDes: SISTEM INFORMASI AKUNTANSI

Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan suatu hal yang sangat baik jika dapat diterapkan dengan benar. Sistem Informasi Akuntansi (SIA) membawa manfaat yang baik bagi BUMDes, karena dapat membantu dalam pengelolaan lalu lintas dana yang akan terjadi dan sudah terjadi, membantu menjaga aset yang sudah dimiliki, membantu dalam mengelola sumber daya manusia, dan membantu dalam mengambil keputusan atau langkah berikutnya dari BUMDes. Tentu penggunaan dari Sistem Informasi Akuntansi (SIA) ini akan bergantung kepada akuntan yang dimana di amanatkan dalam pengelolaan dan pencatatan dana yang akan disalurkan. Akuntan merupakan individu yang memperoleh keahlian dan kemampuan khusus dari tingkat pendidikan dan dibantu akan pengalaman kerjanya dari awal menjadi akuntan hingga masa kini. Tentu seorang akuntan juga dapat terbantu dengan pelatihan akan penggunaan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang dapat membantunya. Namun apakah pengaruh yang diberikan oleh tingkat pendidikan, pengalaman kerja, dan pelatihan yang didapat oleh seorang akuntan terhadap penggunaan Sistem Informasi Akuntansi (SIA).



BAB
4

BUMDes: EKSPEKTASI KINERJA, EKSPEKTASI USAHA, DAN MOTIVASI KERJA

Indonesia merupakan negara yang memiliki tujuan penerapan kesejahteraan umum bagi masyarakatnya. Mengingat bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman yang begitu dinamik, maka diperlukannya pemerintah yang tahu dan bisa melakukan pengelolaan akan sumber daya yang dimiliki. Maka setiap daerah memerlukan Badan usaha miliknya sendiri agar dapat melakukan pembedayaan sumber daya yang ada secara efektif. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu sarana yang dimiliki oleh pemerintah desa untuk melakukan pembedayaan bagi masyarakatnya. Supaya dapat berkembang dengan baik, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) membutuhkan pengelolaan akuntansi yang baik agar dana yang dimiliki tahu ada berapa banyak dan akan disalurkan ke mana saja. Untuk itu perlu juga diketahui apa saja yang mempengaruhi akan pengelolaan akuntansi BUMDes. Kita tinjau berdasarkan penelitian ilmiah apakah Ekspektasi Kinerja, Ekspektasi Usaha, Dan Motivasi kerja memiliki pengaruh yang bersifat positif pada pengelolaan Akuntansi pada BUMDes?



BAB
5

BUMDes: PEMASARAN

Indonesia merupakan negara yang masih berkembang dalam segala aspek. Perkembangan ekonomi merupakan salah satu cara dalam mencapai kesejahteraan umum, sehingga diperlukannya sebuah perhatian khusus. Pemerintah dapat membantu perkembangan ekonomi melalui badan usaha yang dimiliki. Pemerintah desa melalui BUMDes dapat melakukan kegiatan ekonomi dalam desa sehingga menghidupkan desa kembali. Pada masa kini pasar yang tadinya tidak bisa dimasuki kini bisa dimasuki dengan mudah cukup memakai internet dan sosial media. Untuk itu banyak sekali perusahaan dan pesaing yang bermunculan. Ini akan memberikan efek yang sangat signifikan akan pemasaran yang dilakukan oleh BUMDes. Maka dari itu peneliti merasa diperlukan melihat akan pengaruh yang diberikan oleh sosial media akan pemasaran BUMDes. Peneliti menggunakan metode studi literatur untuk penulisan jurnal ini. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah sosial media akan membawa efek yang cukup signifikan pada BUMDes. Hubungan dari pengaruh tersebut bisa berupa positif ataupun negatif, hal ini bergantung kepada kesiapan BUMDes.

DAFTAR PUSTAKA

1. Abdurofiq, A. (2014). Menakar pengaruh masyarakat ekonomi ASEAN 2015 terhadap pembangunan Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 1(2).
2. Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto, D. (2016). Pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes). *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 13(1).
3. Agustina, F., & Sari, D. P. P. (2020). Pengaruh Kecanggihan Teknologi Informasi, Partisipasi Manajemen, Pengetahuan Manajer, Pelatihan Dan Pengalaman Kerja Terhadap Efektifitas Sistem Informasi Akuntansi. 1, 35–48.
4. Akbar, D. A. (2016). Inflasi, Gross Domesctic Product (Gdp), Capital Adequacy Ratio (Car), Dan Finance To Deposit Ratio (Fdr) Terhadap Non Performing Financing (Npf) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics*, 2(2), 19–37.
5. Alda, S., Aisah, N., Wijayanti, R. K., & Yuana. (2021). ANALISIS KONSEP SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PADA PT. BANK CENTRAL ASIA TBK. Universitas Mercu Buana. https://www.researchgate.net/profile/Yuana-Yuana-3/publication/354534992_SIA_Kelompok_6_C410/links/613dfe2be4419c5e6ec7362a/SIA-Kelompok-6-C410.pdf
6. Alif, M. R. (2014). Privatisasi BUMN dan Otonomi Daerah dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 44(3), 406–434.
7. Amin, S. (2019). Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat. *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, 8(1), 1–10.

8. Amri, P. D. (2000). Dampak Ekonomi dan Politik UU No. 22 dan 25 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah. Centre for Strategic and International Studies, Jakarta.
9. Anik, P. (2016). Menyibak Pelaporan Aset Bersejarah Berdasarkan PSAP No.07 Tahun 2010. Blitar: Universitas Islam Blitar.
10. Anjani, P. W., & Wirawati, N. G. P. (2018). Pengaruh usia, pengalaman kerja, tingkat pendidikan, dan kompleksitas tugas terhadap efektivitas pengguna sistem informasi akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi*, 22(3), 2430–2457.
11. Asshiddiqie, J. (2011). Gagasan negara hukum Indonesia. Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan.
12. Bawono, Y. (2017). Kemampuan Berbahasa pada Anak Prasekolah: Sebuah Kajian Pustaka. Prosiding Temu Ilmiah X Ikatan Psikologi Perkembangan Indonesia.
13. BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2015-2019. (Accessed on May, 2022). Retrieved from Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/indicator/27/1225/1/proporsi-individu-yang-menggunakan-internet-menurut-provinsi.html>
14. BUMDes Meningkatkan Pendapatan Asli Desa—Infografik Katadata.co.id. (2018, Desember 5). <https://katadata.co.id/arsip/infografik/5e9a558d9c084/bumdes-meningkatkan-pendapatan-asli-desa>
15. Chorvinno Tatu, M. A., & Margaret Rafael, S. J. (2021). PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP KINERJA KARYAWAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR. *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*, Vol.9, No.1, 53-61.
16. Cresswell, J. W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

17. Creswell, J. W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
18. Dana, A., & Setiawati, L. (2011). *Sistem informasi akuntansi*. Yogyakarta [ID]: Andi.
19. Darimi, I. (2015). Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru PAI dalam Pembelajaran. *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, 5(2), 309–324.
20. Desa, K. (n.d.). *Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia*. Jakarta Pusat.
21. Dewi, A. C. (2016). Pengaruh Pengalaman Kerja, Kompetensi, Dan Independensi Terhadap Kualitas Audit Dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 4(8).
22. Dewi, K. C., Sukma, K. P., & Putra, Y. N. (2018). Analisis Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi dalam Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Studi Pada Badan Usaha Milik Desa Giri Amertha Desa Tajun). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol.9, No.3.
23. Dewi, P. K., & Triaryati, N. (2015). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, suku bunga dan pajak terhadap investasi asing langsung.
24. Didjaja, M. (2003). *Transparansi Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
25. Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW. (2022). *Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021 | ICW*. <https://antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-kasus-korupsi-tahun-2021>
26. Dwi, M., & Dkk. (2017). *Akuntansi Keuangan Menengah*. Jakarta: Edisi 2. Salemba Empat.
27. Dwijayanthi, D. M., & Dharmadiaksa, I. (2013). Pengaruh insentif, tingkat pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja pada kinerja individu pengguna sistem informasi akuntansi SKPD DISPENDA Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 332–344.

28. Edward III, G. E. (1980). *Implementing Public Policy* Englewood. New Jersey: Prentice Hall, Inc.
29. Ervianto, W. I. (2017). Tantangan pembangunan infrastruktur dalam proyek strategis nasional indonesia. *Simposium II UNIID 2017*, 2(1), 98–103.
30. Fawkes, G. (2022). *Tren Internet 2022. Statistik & Fakta di Amerika Serikat dan Seluruh Dunia.* vpnMentor. <https://id.vpnmentor.com/blog/trend-internet-vital/>
31. Ferawati, M. (2013). *Harmonisasi Pola Hubungan Komisi Pemberantasan Korupsi Dan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.*
32. Furqaini, A. (2009). *Pengelolaan Keuangan Desa dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Pemerintahan Desa Kalimo'ok Kecamatan Kali-anget Kabupaten Sumenep).* Tesis. Program S2 Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Surabaya.
33. Habibi, M. M. (2016). Analisis Pelaksanaan Desentralisasi dalam Otonomi daerah kota/kabupaten. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 28(2).
34. Hakim, L. (2016). Pemerataan akses pendidikan bagi rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1).
35. Halim, A. T. (2021). Hubungan antara kepercayaan kepada pemerintah dengan kesejahteraan finansial dan kesejahteraan umum selama COVID-19 di Indonesia.
36. Halwiah, D. (2021). *Improving Learning Outcomes Through Mnemonic Techniques in Mathematics Learning.* *Alauddin Journal of Mathematics Education*, 3.
37. Harahap, F. R. (2013). Dampak urbanisasi bagi perkembangan kota di Indonesia.

38. HARYANTO, T. (2001). PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN BANYUMAS.
39. Hasibuan, S. M. (2018). Pengaruh Kepemimpinan, Lingkungan Kerja dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja. *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 1(1), 71–80.
40. Hidayat, N. (2017). Rujukan Dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Pasca Amandemen Ke Tiga. *UIR Law Review*, 1(2), 191–200.
41. Huripah, E. (2015). Pekerjaan sosial dengan disabilitas di Indonesia. *Pekerjaan Sosial*, 13(2).
42. Ikhwanisyah, I., Chandrawulan, A. A., & Amalia, P. (2018). Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). *Jurnal Media Hukum*, 25(2), 150–161.
43. Indayani, S., & Hartono, B. (2020). Analisis Pengangguran dan pertumbuhan ekonomi sebagai akibat pandemi Covid-19. *Jurnal Perspektif*, 18(2), 201–208.
44. Indonesia, R. (1959). Undang-Undang Dasar 1945. Dewan Pimpinan PNI, Department Pen. Prop. Pen. Kader.
45. Indriyanthi, N. I., Nurabiah, & Suhaedi, W. (2021). ANALISIS PENGELOLAAN DAN AKUNTABILITAS LAPORAN EUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI KECAMATAN GUNUNGSARI KABUPATEN LOMBOK BARAT. *Jurnal RISMA*, Vol.1, No.4, 13-26.
46. International Monetary Fund. (2021). World Economic Outlook Database October 2021. International Monetary Fund. <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/October>
47. Irawati, D., & Martanti, D. E. (2017). TRANSPARANSI PENGELOLAAN LAPORAN KEUANGAN BUMDes TERHADAP PELAPORAN ASET DESA (Studi Fenomenologi Pada BUMDes Desa Karangbendo Kecamatan

- Ponggok Kabupaten Blitar). Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper Ekonomi dan Bisnis, 41-51.
48. Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Provinsi, 2021. (2021). Retrieved from Badan Pusat Statistik: https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/bEVXU252SU9hTjBxWEU3Z2NpS1ZPQT09/da_02/1
 49. Junaidi, M. (2018). Hukum Konstitusi: Pandangan dan gagasan modernisasi negara hukum.
 50. Junaidi, M. A. (2018). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Penguatan Ekonomi Masyarakat di Desa Kedung Turi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.
 51. Junita, A., Hasbulla, I. I. K., & Azhmy, M. F. (2020). Survei Pasar Online: Strategi Riset Pasar Untuk Mengembangkan Usaha Mikro Wanita Di Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 26(4), 205–214.
 52. Kadir, Y., & Moonti, R. M. (2018). Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 6(3), 430–442.
 53. Kamaroesid, H. (2016). *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
 54. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (2013). Medan: Bitra Indonesia.
 55. Kartika, D. N., Sinarwati, N. K., & Wahyuni, M. A. (2017). Efektivitas Pengelolaan Dana pada Badan Usaha Milik Desa Kerta Danu Mandara di Desa Songan. *E-Journal S1 Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol.8, No.2.
 56. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2020). Retrieved from bumdes.kemendesa.go.id/
 57. Koso, J., Ogotan, M., & Mambo, R. (2018). *MANAJEMEN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (Studi di Desa Watulaney*

- Amian Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.4, No.51, 12.
58. Krina, P. L. (2003). *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Bappens.
 59. Krismiaji. (2015). *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: Edisi 4. UPP STIM YKPN.
 60. KURNIANINGTYAS, M. (2017). *RISET PASAR PRODUK BOARD GAME SEBAGAI SUATU USAHA BARU*.
 61. Lakutomo, G. S. (2014). *Analisis Pemasaran Terhadap Bisnis Online (E-Commerce) Dalam Jaringan Sosial Internet*.
 62. Lestanti, D. (2015). *Pengaruh pengetahuan akuntansi, pengalaman usaha, dan motivasi kerja terhadap persepsi penggunaan informasi akuntansi pada pelaku UMKM di Boyolali*. Yogyakarta: Skripsi. Universitas negeri Yogyakarta.
 63. Liow, H., Lengkong, F. D., & Palar, N. (2018). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA TONDEGESAN KECAMATAN KAWANGKOAN*. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.4, No.61, 13.
 64. Loekamto, A. (2012). *Implementasi technology acceptance model (TAM) dalam online shopping*. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Manajemen*, 1(3).
 65. Lubis, A., & Muda, I. (2018). *Analysis of Ownership and Stock Composition of Vocational Business Enterprises (BUMDES) and Its Impact on" Omset" of Business Owned Enterprises*. 274–277.
 66. Marjana, I. K. (1994). *Keberadaan PP-3/1983 dan Tuntutan Perubahan Manajemen BUMN dalam Menghadapi Globalisasi Ekonomi*. *Economics and Finance in Indonesia*, 42, 83–97.
 67. Maryunani. (2008). *Pembangunan BUMDes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Bandung: CV Pustaka Setia.

68. Maturbongs, Y. H. (2021). Kecakapan Digital sebagai Fondasi Keahlian di Masa Pandemi. *TarFomedia*, 2(1), 11–16.
69. Mohtar, I. (2019). Hubungan antara motivasi kerja dan pengalaman kerja dengan kinerja guru madrasah. *Uwais Inspirasi Indonesia*.
70. Mulyadi, D. (2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
71. Mulyono, S. P. (2014). Sinergitas Penyelenggaraan pemerintahan desa pasca pemberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(3), 438–444.
72. Nadhiroh, S. A., & LAKSITO, H. (2010). Pengaruh Kompleksitas Tugas, Orientasi Tujuan, dan Self-Efficacy Terhadap Kinerja Auditor Dalam Pembuatan Audit Judgment (Studi Pada Kantor Akuntan Publik di Semarang).
73. Nazir, M. (2005). *Metodologi Penelitian*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia.
74. Ningrum, T. W. (2016). Pengaruh Ekspektasi Kinerja, Ekspektasi Usaha, Faktor Sosial, Kesesuaian Tugas Dan Kondisi Yang Memfasilitasi Pemakai Terhadap Minat Pemanfaatan Sistem Informasi (Studi Pada Bank Pengkreditan Rakyat Di Kabupaten Karanganyar).
75. Noviardila, S. N. (2021). Kajian Literatur Pengaruh Model Learning Cycle terhadap Hasil Belajar Tematik Terpadu. *Journal of Education Research*, Vol.2, No.2, 1-5.
76. Novita, I. (2017). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA) DI KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN. *Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik*, 11-18.
77. Nugroho, R. A., Septemuryantoro, S. A., & Lewa, A. H. (2017). *Penerjemahan: Sebuah Cara Untuk Meningkatkan Kualitas Pariwisata Indonesia*. 9.
78. Nuraini, I. (2016). *Pengantar Ekonomi Mikro*. UMMPress.

79. Nurlan, D. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah Jakarta*. Jakarta: Cetakan Pertama. PT Indeks.
80. Nurlan, D. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Cetakan Pertama. PT Indeks.
81. O'Neill, A. (2021). *Indonesia—Gross domestic product (GDP) 2026*. Statista. <https://www.statista.com/statistics/320142/gross-domestic-product-gdp-in-indonesia/>
82. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014. (Accessed on May, 2022). Retrieved from JDIH BPK RI: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111736/permendagri-no-113-tahun-2014>
83. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. (Accessed on May, 2022). Retrieved from Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: https://jdih.kemendes.go.id/index.php?/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_4_tahun_2015
84. Prasetyo, R. A. (2016). Peranan BUMDES dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Dialektika*, 11(1), 86–100.
85. Pratama, A. B. (2012). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Pustaka Media Press.
86. Purba, B. (2020). Analisis Tentang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode Tahun 2009–2018. *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum*, 4(2), 244–255.
87. Puspasari, R. O. (2021). Analisis Penggunaan Model Pembelajaran Group Investigation (Investigasi Kelompok) pada Mata Pelajaran

- Kearsipan di SMKN 1 Lamongan. *Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran*, Vol.9, No.1, 77-84.
88. Rahayu, M. (2017). Keragaman di Indonesia dan Politik Pengakuan (Suatu Tinjauan Kritis). *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 4(2).
 89. Rahmat, A. (2021). KONSEP PERBANDINGAN GEOPOLITIK, SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI NEGARA-NEGARA MAJU DAN NEGARA BERKEMBANG. *Jurnal Pendidikan" EDUKASIA MULTIKULTURA"*, 3(1), 35–51.
 90. Rakhmawati, N. A., Permana, A. E., Reyhan, A. M., & Rafli, H. (2021). Analisa Transaksi Belanja Online Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Teknoinfo*, 15(1), 32–37.
 91. Ramadana, C. B. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Penguatan Ekonomi Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.1, No.6.
 92. Rawley, J. A. (1963). The Nationalism of Abraham Lincoln. *Civil War History*, 9(3), 283–298.
 93. RICO DEWANTORO, R. (2020). Pengaruh Ekspektasi Usaha, Tingkat Pendidikan, Dan Lama Usaha Terhadap Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi.
 94. Ridlwan, Z. (2014). Urgensi BUMDes dalam Pembangunan Perekonomian Desa. *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung*, 8(3), 424–440.
 95. Risal, R., Wulandari, R., & Jaurino, J. (2020). Pendampingan Akuntansi Dan Keuangan BUMDes Sedahan Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara. *Cendekia: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 49–57.
 96. Riyanto, T. (2015). Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. *Ejournal Administrasi Negara*, 3(1), 199–130.

97. Rofidah, N., & Rochayatun, S. (2020). IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIKI DESA (STUDI DESA GONDOWANGI WAGIR KABUPATEN MALANG). *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi*, Vol.11, No.1, 60-70.
98. Rokhmah, B. E., & Yahya, I. (2020). Tantangan, Kendala, Dan Kesiapan Pemasaran Online UMKM Di Desa Nglebak, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, 1(1), 20–31.
99. Romney, M. B., & Steinbart, J. P. (2018). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Edisi 13. Salemba Empat.
100. Royani, A. (2020). Pesantren Dalam Bingkai Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Indonesia. *Jurnal Islam Nusantara*, 2(1), 121–128.
101. Saleh, A. R., & Utomo, H. (2018). Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi Kerja, Etos Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Bagian Produksi di PT. Inko Java Semarang. *Among Makarti*, 11(1).
102. Samadi, Rahman, A., & Afrizal. (2015). PERANAN BADAN USAHA MILIKI DESA (BUMDes) DALAM PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT (STUDI PADA BUMDes DESA PEKAN TEBIH KECAMATAN KEPENUHAN HULU KABUPATEN ROKAN HULU). Retrieved from [media.neliti.com: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://media.neliti.com/media/publications/110259-ID-peranan-badan-usaha-milik-desa-bumdes-da.pdf&ved=2ahUKewjqkflHqLn3AhXJ73MBHV1VC6EQFnoECAkQAQ&usg=AOvVaw3lverJ4EDQ84-z-sYE2nSP](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://media.neliti.com/media/publications/110259-ID-peranan-badan-usaha-milik-desa-bumdes-da.pdf&ved=2ahUKewjqkflHqLn3AhXJ73MBHV1VC6EQFnoECAkQAQ&usg=AOvVaw3lverJ4EDQ84-z-sYE2nSP)
103. Saputri, L. G., & Widiastuti, S. W. (2016). Pengaruh Ekspektasi Kinerja, Ekspektasi Usaha, Faktor Sosial, Kesesuaian Tugas, dan Kondisi yang Memfasilitasi Pengguna Terhadap Minat Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah (SIPKD)(Survei pada

- Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen). *Kajian Akuntansi*, 11(2), 103–119.
104. Sayekti, N. W. (2018). Tantangan perkembangan ekonomi digital di Indonesia. *Info singkat*, 10(5), 19–24.
 105. Sayuti, A. J. (2012). Perkembangan Ekonomi Makro Negara Maju Dan Berkembang Di Asia Dan Eropa: Indonesia–China, Bosnia Dan Herzegovina–Jerman. *Orasi Bisnis: Jurnal Ilmiah Administrasi Niaga*, 7(1).
 106. Selamat, I. K. (2016). Pengaruh efektivitas penerapan sistem informasi akuntansi dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada BUMDes se-Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 7(2), 12–20.
 107. Setiawan, I. W., Musmin, L. S., & Julianto, I. P. (2019). Pengaruh Ekspektasi Kinerja, Ekspektasi Usaha, Dan Faktor Sosial Terhadap Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Pada Bumdes Di Kecamatan Kubutambahan. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 10(3), 320–331.
 108. Sholihah, I. (2021). Pendampingan Pemanfaatan Media Sosial Dan E-Commerce Sebagai Peluang Usaha Mandiri pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Malang. *Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 21–31.
 109. Siallagan, H. (2016). Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 18(2), 122–128.
 110. Sinuor, Y. L. (2010). Etika bisnis: Pendekatan filsafat moral terhadap perilaku pebisnis kontemporer. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
 111. Situmorang, J. R. (2021). Kesiapan masyarakat Indonesia bertransformasi menjadi masyarakat digital.
 112. Sobri, & Dkk. (20019). *Pengelolaan Pendidikan*. Jakarta: Multi Pressindo.

113. Soemarsono, M. (2007). Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 37(2), 300–322.
114. Sofyani, H., Ali, U. N. N. A., & Septiari, D. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang Baik dan Perannya terhadap Kinerja di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*, 5(2), 325–359.
115. Soleh, C., & Rochmanjah, H. (2015). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokus Media.
116. Sudradjat, S., & Djanegara, M. S. (2020). PKM Uji Kompetensi Bidang Keahlian Akuntansi Di SMK Bina Sejahtera Kota Bogor. *Jurnal Abdimas Dedikasi Kesatuan*, 1(1), 21–28.
117. Suhardi, G. (2007). *Revitalisasi BUMN*. Yogyakarta: Univ Atmajaya.
118. Suhardin, Y. (2012). Peranan Negara Dan Hukum Dalam Memberantas Kemiskinan Dengan Mewujudkan Kesejahteraan Umum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 42(3), 302–317.
119. Suhardjana, J. (2010). Supremasi Konstitusi Adalah Tujuan Negara. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 253–264.
120. Sukarini, L., & Dewi, P. E. D. M. (2019). Pengaruh tingkat pendidikan, pengalaman kerja, pelatihan, dan penggunaan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes di Kecamatan Negara. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 9(3).
121. Suwarjono. (2006). *Teori Akuntansi Perencanaan Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta: Cetakan Kedua BPFE.
122. Syauqi, M. A. (2014). Optimalisasi pengelolaan wakaf uang untuk kesejahteraan umum. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 369–383.
123. Tanjung, A. H. (2000). *Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik*. Yogyakarta: BPFE UGM.
124. Terry, G. R. (2006). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.

125. Thoriq, M. B. A. (2019). Kebijakan Pemberlakuan Satu Harga Bbm Pt. Pertamina (Persero) Ditinjau Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.
126. Turner, L., Weickgenannt, A., & Coopeland, M. K. (2017). *Accounting Information Systems, Controls, and Processes*. Third Edition. John Wiley & Sons, Inc.
127. Umar, H. (2011). Peran akuntan dalam pemberantasan korupsi. *Sosiohumaniora*, 13(1), 108.
128. Umiyati, E. (2014). Analisa pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan antar wilayah di Pulau Sumatera. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 9(2).
129. Undang-Undang Dasar 1945, (1945).
130. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. (n.d.).
131. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. (n.d.).
132. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (n.d.).
133. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. (Accessed on May, 2022). Retrieved from DPR RI: https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf
134. Uno, H. B. (2007). *Teori motivasi & pengukurannya*.
135. Wahyudi, A. (2016). Implementasi rencana strategis badan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam upaya pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, Vol.2, No.2, 101-105.
136. Widagdo, P. B. (2016). Perkembangan electronic commerce (e-commerce) di Indonesia. *Researchgate Article*.
137. Widodo, P. P. (2011). *Menggunakan UML*. Jakarta: Informatika.
138. Widyantari, N. W. L., & Suardikha, I. M. S. (2016). Pengaruh pelatihan dan pendidikan, pengalaman kerja dan partisipasi

- manajemen pada efektivitas penggunaan sistem informasi akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi*, 17(2), 1546–1574.
139. Wijaya, D. R., & dkk. (2022). PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN DAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP TRANSPARANSI KINERKA KEUANGAN BUMDES. *JURNAL ILMIAH AKUNTANSI DAN KEUANGAN*, Vol.5, No.1, 288-300.
 140. Yanti, P. L., & Musmini, L. S. (2020). Menerapkan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pamsimas pada BUMDes Giri Artha. *Jurnal Akuntansi Prodesi*, Vol.11, No.1, 47-58.
 141. Yuni, R., Putra, P. D., & Hutabarat, D. L. (2020). Sinergi indonesia menuju negara maju. Prosiding WEBINAR Fakultas Ekonomi Unimed “Strategi Dunia Usaha Menyikapi Status Indonesia Sebagai Negara Maju: Pra dan Pasca Covid-19,” 35–42.
 142. Zakaria, R. Y. (2002). Pemulihan Kehidupan Desa dan UU No. 22 Tahun 1999. *Unisia*, 280–298.
 143. Zamzami, A. (2020). Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik. *Jurnal fakultas hukum universitas islam malang*.
 144. Zamzami, F., Nusa, N. D., & Faiz, I. A. (2021). *Sistem Informasi Akuntansi*. UGM PRESS.

PROFIL PENULIS

Dr. H. Sihabudin, S.E., M.M



Penulis lahir di Karawang 5 Agustus 1969. Menyelesaikan Pendidikan Sarjana S1 di Universitas Singaperbangsa Karawang tahun 1995, meraih dua gelar Magister Manajemen pada STIE IPWIJA Jakarta tahun 2000 dan STIM IMMI Jakarta tahun 2005. Pada tahun 2019 berhasil meraih gelar Doktor dari Universitas Pasundan Bandung. Menjadi dosen tetap di Universitas Singaperbangsa Karawang (1995-2015) sekaligus ketua Program Studi D3 Akuntansi (2000-2004) dan Kepala Biro Keuangan (2004-2009). Sejak 2015 memilih Universitas Buana Perjuangan Karawang sebagai homebase dengan Jabatan Wakil Rektor 2 Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian (2015-2022), Saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Pengembangan Pendidikan (2022-2026). Penulis aktif dalam penelitian baik yang dipublikasikan pada jurnal nasional maupun jurnal internasional bereputasi dan berdampak. Menjadi reviewer pada jurnal nasional dan jurnal terindeks scopus juga menerbitkan buku-buku bidang ilmu ekonomi diantaranya “Analisis & Kinerja Laporan Keuangan Perusahaan”, “Ekonometrika Dasar Teori dan Praktik Berbasis SPSS”, dll. Pengalaman lainnya menjadi Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2009-2014. Penulis dapat dihubungi melalui email: sihabudin@ubpkarawang.ac.id



Manajemen keuangan merupakan segala aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan usaha untuk mendapatkan pendanaan yang diperlukan dengan biaya minimal dan syarat-syarat yang paling menguntungkan, serta usaha untuk menggunakan dana tersebut se-efisien mungkin. Selain itu kegiatan manajemen ini juga bertujuan untuk mengelola dana maupun aset-aset yang dimiliki perusahaan untuk dimanfaatkan pada hal-hal atau kegiatan yang membantu tercapainya tujuan utama perusahaan (profit). Tujuan dari manajemen keuangan dapat terlihat dalam proses penilaian yang dilakukan oleh pasar uang. Dalam hal ini, tujuan utamanya yaitu memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Badan usaha milik desa (atau diakronimkan menjadi Bumdes) merupakan usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, dan berbadan hukum. Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat desa setempat. [1] Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari Pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pinjaman, atau penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman, yang dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas Desa. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa berkaitan dengan pendirian dan pengeleolaan selama pendirian. Pendirian Badan Usaha Milik Desa diadakan oleh pemerintah desa. Sedangkan kepemilikan modal dan pengelolaan usahanya diselenggarakan bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat. Pendirian Badan Usaha Milik Desa diprakarsai oleh pemerintah pusat. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa harus sesuai dengan tujuan pendiriannya. Badan Usaha Milik Desa dikelola hingga taraf hidup masyarakat meingkat secara ekonomi. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa juga harus mampu meningkatkan kemampuan keuangan pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, pengelolaan Badan Usaha Milik Desa harus meningkatkan kegiatan dan perekonomian warga masyarakat di pedesaan. Pendirian dari Badan Usaha Milik Desa dilakukan dengan musyawarah bersama antara penduduk desa dan pemerintah desa yang pengelolaannya, Badan Usaha Milik Desa menerapkan asas kekeluargaan dan gotong royong.